



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Edisi Jum'at 14 Februari 2025



RINGKASAN BERITA HARI INI



Sosialisasi dan Perencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Delta Wibawa.

Sosialisasi GNSTA untuk Wujudkan Tertib Arsip

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Sosialisasi dan Perencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Delta Wibawa.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, dr. Atok Irawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang tertata dengan baik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bermutu.

"Manajemen arsip yang rapi, tertib, dan sistematis akan mempengaruhi kinerja administrasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta bermuara pada pelayanan publik yang lebih optimal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah, kecamatan, BUMD, desa/kecamatan, serta lembaga pendidikan dalam menerapkan sistem pengarsipan yang baik. "Arsip adalah urusan wajib pemerintah. Sebagai dokumen negara,

arsip harus dikelola dengan baik karena menjadi bukti pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat," tambahnya. Sebagai komitmen, dalam acara ini dilakukan penandatangan pernyataan dukungan terhadap GNSTA oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, kecamatan, desa/kecamatan, BUMD, dan lembaga sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang GNSTA. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang penerapan GNSTA di lingkungan pemerintahan daerah.

"Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip adalah program strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Arsip yang tertata dengan baik akan menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor

pembangunan," ungkapnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, kecamatan, desa/kecamatan, BUMD, serta perwakilan lembaga pendidikan. Acara ini juga menghadirkan narasumber Diyah Kuswardani, MM., dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam bidang kearsipan, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih nilai Kategori AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo juga menempati peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan masuk dalam 10 besar terbaik di tingkat provinsi, serta peringkat ke-19 dari 376 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan semangat yang sama, mari kita terus berkomitmen dalam menerapkan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kemajuan daerah kita," pungkask dr. Atok Irawan. • Leo

Dua Tim Satgas Dikerahkan untuk Perbaikan Jalan Lingkar Timur

Jalan Lingkar Timur mengalami kerusakan parah dengan banyak lubang di berbagai titik. Kondisi ini semakin memburuk akibat hujan deras dan tingginya mobilitas kendaraan berat yang melintas setiap hari.

Menanggapi hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo mengerahkan dua tim Satgas untuk memperbaiki jalan yang rusak. Saat ini, proses perbaikan sedang berlangsung.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Drs. Eko Suprianto, menjelaskan bahwa hujan deras memperparah kondisi jalan. Selain itu, tingginya volume kendaraan berat juga menjadi faktor utama kerusakan. "Hal ini menyebabkan jalan semakin rusak. Oleh karena itu, kami mengerahkan Satgas penanganannya untuk segera melakukan perbaikan," ujarnya.

Agar perbaikan berjalan lebih cepat, pihaknya telah mengidentifikasi titik-titik kerusakan terlebih dahulu.

Ke Halaman 10



BANYAK LUBANG: Penambalan Jalan Lingkar Timur yang rusak terus dilakukan.

Disdukcapil Jemput Bola, Rekam E-KTP di Sekolah

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo terus menggenjot capaian e-KTP bagi pemula atau mereka yang baru masuk usia 17 tahun. Salah satunya, menggelar perekaman e-KTP dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) ke sekolah-sekolah.

Kemarin (13/2), layanan *goes to school* tersebut digelar di SMAN 1 Taman.

Kasi Identitas Disdukcapil Sidoarjo Azwar Rifqi menuturkan, tahun ini pihaknya kembali gencar jemput bola layanan langsung ke sekolah-sekolah. Sasarannya, anak yang

baru berusia 17 tahun dan yang belum memiliki KTP. "Kami gelar lagi di 2025 ini. Seminggu sekali. Bergiliran ke tiap-tiap sekolah," katanya. Layanan utamanya adalah perekaman e-KTP dan aktivasi IKD. "Hari ini (kemarin, Red) ada 112 anak yang perekaman di sini (SMAN 1 Taman)," kata Rifqi. Sementara, yang sudah aktivasi IKD sebanyak 60 anak.

Dia mengatakan, selama awal 2025 ini sudah digelar kali digelar layanan *goes to school*. Ke depan, layanan tersebut akan terus dilaksanakan. Saat ini blangko KTP juga sudah normal sehingga tidak ada lagi antrean



ada layanan langsung ke sekolah. Dengan begitu, siswa tidak perlu datang ke mal pelayanan publik (M... untuk pencetakan. Sekolah juga bisa mengajukan ke dinas jika ingin... mal pelayanan publik (M... untuk melakukan per... kasaan. (susi/ia)

Pelunasan Ongkos Haji Dimulai Hari Ini

Biaya Embarkasi Surabaya Rp 94,9 Juta, Tanggungan CJH Rp 60,9 Juta

Embarkasi	Bijih	Bijih
• Aceh	Rp 46.922.333	Rp 20.290.631
• Medan	Rp 47.976.531	Rp 20.290.631
• Batam	Rp 44.293.781	Rp 20.290.631
• Padang	Rp 51.781.791	Rp 20.290.631
• Palembang	Rp 54.019.791	Rp 20.290.631
• Jakarta	Rp 58.075.791	Rp 20.290.631
• Solo	Rp 55.478.501	Rp 20.290.631
• Surabaya	Rp 60.995.791	Rp 20.290.631
• Balikpapan	Rp 57.235.421	Rp 20.290.631
• Banjarmasin	Rp 59.231.791	Rp 20.290.631
• Makassar	Rp 57.670.921	Rp 20.290.631
• Lombok	Rp 58.075.791	Rp 20.290.631
• Kerinci	Rp 56.794.801	Rp 20.290.631

JAKARTA - Pemerintah akhirnya mengumumkan jadwal pelunasan biaya haji reguler. Para calon jemaah haji (CJH) bisa melunasi biaya haji mulai hari ini (14/2). Informasi itu melengkapi pengumuman biaya haji per embarkasi di dalam Kepres 6/2025 yang diumumkan kemarin (13/2).

"Pelunasan bijih (biaya perjalanan ibadah haji) jemaah haji reguler mulai 14 Februari sampai 14 Maret," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemag Hilman Latief kemarin. Menurut dia, biaya pelunasan masing-masing CJH bisa berbeda. Besar, jemaah haji memiliki tanggungan di dalam rekening virtual masing-masing.

Hilman mengatakan, seluruh CJH sebelumnya membayar setoran awal Rp 25 juta per orang. Kemudian, informasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di setiap rekening virtual (CJH), ada tabungan sekitar Rp 2 juta. Uang tersebut adalah bagi hasil dari hasil investasi dana haji oleh BPKH. Sehingga saat pelunasan nanti, mereka (CJH) tinggal membayar selisihnya saja," jelasnya. Selisih itu didapat dari total bijih di tiap-tiap embarkasi dikurangi dengan setoran awal. Kemudian, dikurangi juga tabungan di masing-masing rekening virtual CJH. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPH) atau biaya haji

Polisi Gencar Edukasi Bahaya Bullying

Sidoarjo, Memorandum Maraknya perbuatan perundangan (*bullying*) di kalangan pelajar, menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk mengedukasi para pelajar terkait dampak *bullying* dan bijak bermedia sosial.

Seperti dilakukan Kanit Bimas Polsek Krembung Polresta Sidoarjo-Aiptu Adin, Kamis (13/2), dengan memberikan edukasi bahaya *bullying* dan bijak bermedia sosial di MI As Syakira, Krembung.

Perundangan (*bullying*) menurut pendapat dari Aiptu Adin kepada siswa-siswi MI As Syakira, bermula dari perbuatan saling mengejek sesama teman. Kemudian secara terus menerus tidak hanya berlanjut di lingkungan sekolah, namun sampai di ranah media sosial.



Polisi edukasi bahaya *bullying*. Ketika saling mengejek di lingkungan di media sosial, tentu semakin menyebar luas hingga membuat korban *bullying*.

ingmerasa malu. Bahayanya lagi menurutnya, dampak *bullying* ini kadangkala berujung pada perkelahian antar teman.

"Tindakan perundangan atau *bullying* ini bila tidak segera terselesaikan tentu memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Apalagi kalau sampai dibawa ke ranah media sosial dan berujung pada perkelahian atau tawuran. Karenanya kepada para pelajar mari stop *bullying*," pesan Aiptu Adin.

Lebih lanjut, para pelajar di-himbau Polisi apabila mengalami *bullying* atau mengetahui tindakan *bullying* agar jangan takut untuk segera melaporkan ke guru sekolahnya. Sehingga tidak semakin panjang *bullying* terjadi bila dapat segera diselesaikan oleh guru maupun dari pihak kepolisian. (Kri/Jok/ep)

Meriahkan Hari Jadi ke-166

SIDOARJO - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjadas) ke-166, Ptt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar acara Sidoarjo Berkolaborasi bersama Habib Syech Bin Abdul Qadir Aseeng. Acara ini digelar di area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Sidoarjo, pada Selasa (11/2/25) malam. Sidoarjo Berkolaborasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan perayaan Harjadas ke-166 yang mengusung tema "Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat". Acara ini dibalut oleh Ptt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi beserta istri, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Dandim 0816, Kapolres Sidoarjo, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkordinda) Kabupaten Sidoarjo. Ribuan jemaah dari Sidoarjo dan sekitarnya turut hadir dalam acara yang diiringi lantunan sholawat serta alunan musik gambus. Mereka berkumpul di area parkir MPP Lingkar Timur untuk berkolaborasi dan berdoa bersama demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Sidoarjo yang kini memasuki usia ke-166.

Acara diawali dengan pembacaan sholawat serta doa bersama untuk para sepuh yang telah berjasa dalam membangun Kabupaten Sidoarjo. Dalam sambutannya, Ptt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk berkolaborasi dan berdoa bersama serta untuk memperkuat Kabupaten Sidoarjo yang terus berkembang.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir malam ini untuk mendukung Sidoarjo agar menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan sejahtera," ujar H. Subandi. Ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan keimanan dan keteladanan agar terdapat dari marabahaya dalam kehidupan.

"Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman agar terhidar dari musibah dan bencana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo," tuturnya. Kemudian acara semakin teras dengan antusias masyarakat yang larut dalam lantunan sholawat. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah serta membentuk keimanan dan keteladanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Perayaan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo refleksi atas perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo dalam membangun daerah dan masyarakatnya. • Leo

Kendaraan Plat Merah Milik Desa Diminta Segera Bayar Pajak

Sidoarjo, Bhirawa Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo nanti akan beraksi so-kepada 322 desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, supaya kendaraan plat merah yang berada di desa segera dibayar pajaknya.

Kepala Bidang Pajak 3 BPPD Kabupaten Sidoarjo, Supriyanto, mengatakan saat ini BPPD Sidoarjo akan mempersiapkan regulasinya lebih dulu. Kemudian juga akan mempersiapkan data berapa jumlah kendaraan plat merah yang ada di desa, yang harus segera melunasi piutang pajak kendaraannya.

"Karena pajak kendaraan ini sangat penting sekali terhadap peningkatan PAD bagi Kabupaten Sidoarjo," kata Supriyanto, Kamis (13/2) kemarin, di sela-sela kegiatan sosialisasi open PKB dan open BBNKB kepada 15 kepala desa di pendopo Kecamatan Bokoran. Menurut Supriyanto, pada tahun 2025 ini open PKB dan open BBNKB, menjadi pajak daerah bagi Kabupaten Sidoarjo. Plat tahun 2025 ini, pajak daerah ini, berpelekat ulang membar PAD bagi Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp386 miliar. Di Jawa Timur, hasil pajak yang diper-



Camat Bokoran, M Supriyanto, ketika sosialisasi open PKB dan open BBNKB bersama BPPD Sidoarjo di pendopo. Kantor Kepala Kabupaten Bokoran, sekitar 400-an jenis kendaraan plat merah, patih dan kuing, masih belum membayar pajaknya. kws. wuu



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



POLSEK KREMBUNG

Edukasi Bahaya Perundungan

POLSEK Krembung memberikan edukasi bahaya perundungan dan bijak bermedia sosial kepada siswa MI As Syakira, Krembung, kemarin (13/2). Kanitbinmas Polsek Krembung Aiptu Adin menjelaskan, perundungan sering bermula dari ejekan antarteman yang berlanjut ke media sosial (*cyberbullying*). (uzi/fal)

CS Dipinda dengan CamScanner

Jawa Pos

Disdukcapil Jemput Bola, Rekam E-KTP di Sekolah

SIDOARJO - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo terus menggenjot capaian e-KTP bagi pemula atau mereka yang baru masuk usia 17 tahun. Salah satunya, menggelar perekaman e-KTP dan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) ke sekolah-sekolah.

Kemarin (13/2), layanan *goes to school* tersebut digelar di SMAN 1 Taman.

Kasi Identitas Disdukcapil Sidoarjo Azwar Rifqi menuturkan, tahun ini pihaknya kembali gencar jemput bola layanan langsung ke sekolah-sekolah. Sasarannya, anak yang

baru berusia 17 tahun dan yang belum memiliki KTP. "Kami gelar lagi di 2025 ini. Seminggu sekali. Bergiliran ke tiap-tiap sekolah," katanya.

Layanan utamanya adalah perekaman e-KTP dan aktivasi IKD. "Hari ini (kemarin, Red) ada 112 anak yang perekaman di sini (SMAN 1 Taman)," kata Rifqi. Sementara, yang sudah aktivasi IKD sebanyak 60 anak.

Dia mengatakan, selama awal 2025 ini sudah empat kali digelar layanan *goes to school*. Ke depan, layanan tersebut akan terus dilaksanakan. Saat ini blangko KTP juga sudah normal sehingga tidak ada lagi antrean



ANGGER BONDAN/JAWA POS

DATA IDENTITAS KEPENDUDUKAN Siswa kelas XI mengikuti proses pembuatan e-KTP yang dilaksanakan disdukcapil di SMAN 1 Taman Sidoarjo, kema (13/2).

untuk pencetakan.

Sekolah juga bisa mengajukan ke dinas jika ingin

ada layanan langsung ke sekolah. Dengan begitu, siswa tidak perlu datang ke

mal pelayanan publik (M untuk melakukan per kaman. (uzi/fal)

CS Dipinda dengan CamScanner

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ Kendaraan Plat Merah Milik Desa Diminta Segera Bayar Pajak

Sidoarjo, Bhirawa

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo nanti akan berkinir surat kepada 322 desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, supaya kendaraan plat merah yang berada di desa segera dibayar pajaknya.

Kepala Bidang Pajak 3 BPPD Kabupaten Sidoarjo, Supriyanto, mengatakan saat ini BPPD Sidoarjo akan mempersiapkan regulasinya lebih dulu. Kemudian juga akan mempersiapkan data berapa jumlah kendaraan plat merah yang ada di desa, yang harus segera melunasi piutang pajak kendaraannya.

"Karena pajak kendaraan ini sangat potensi sekali terhadap peningkatan PAD bagi Kabupaten Sidoarjo," kata Supriyanto, Kamis (13/2) kemarin, disela-sela kegiatan sosialisasi opsen PKB dan opsen BBNKB kepada 15 kepala desa di pendopo kecamatan Buduran.

Menurut Supriyanto, pada tahun 2025 ini opsen PKB dan opsen BBNKB, menjadi pajak daerah bagi Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2025 ini, Pajak daerah itu, berpeluang untuk menambah PAD bagi Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp386 miliar.

Di Jawa Timur, hasil pajak yang diper-



Camat Buduran, M. Suprayitno, ketika sosialisasi opsen PKB dan opsen BBNKB bersama BPPD Sidoarjo di pendopo Kantor Kecamatan Buduran, oleh Kabupaten Sidoarjo dari opsen PKB dan opsen BBNKB itu, berada pada peringkat nomor dua setelah Kota Surabaya.

Petugas Samsat, dari UPT Bapenda Jatim di Sidoarjo, Mahfud Arif, mengatakan di wilayah Kecamatan Buduran ada

sekitar 4000 an jenis kendaraan plat merah, putih dan kuning, masih belum membayar pajaknya. kus.wnn

HARIAN
Bhirawa
Mata Saja Bhirawa

N Bhayangkari Jatim Bagikan Makan Bergizi di Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Kepedulian terhadap anak-anak dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur Ny Ade Imam Sugianto, dengan membagikan makanan bergizi di TK Kemala Bhayangkari 83, SIDOARJO, Kamis 13 Februari 2025.

Kegiatan mendukung program pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal.

Ny Ade Imam Sugianto menyampaikan, program ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan, gizi dan tentunya kemajuan



Ibu Bhayangkari Jatim membagikan makan bergizi di Sidoarjo.

pendidikan kita.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup

agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," ujarnya.

Ia menambahkan, program makan

bergizi ini menjadi salah satu inisiatif pihaknya untuk memperhatikan kesejahteraan dan masa depan cemerlang anak-anak di wilayahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program ini, para orang tua dan pihak sekolah memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Bhayangkari. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Pada kesempatan ini, Ketua PYKB Daerah Jatim Ny Ade Imam Sugianto didampingi pengurus YKB Daerah Jatim, Ketua PYKB Cabang Kota Sidoarjo Ny Dani Tobing dan Kapolresta Sidoarjo Kombespol Christian Tobing memberikan tali asih kepada guru, kader posyandu dan pengurus TK Kemala Bhayangkari 83. (md/rus)

HARIAN
BANGSA
Koran Warga, Jatim

Polisi Gencar Edukasi Bahaya Bullying

Sidoarjo, Memorandum

Maraknya perbuatan perundungan (*bullying*) di kalangan pelajar, menjadi perhatian serius pihak kepolisian untuk mengedukasi para pelajar terkait dampak *bullying* dan bijak bermedia sosial.

Seperti dilakukan Kanit Binmas Polsek Krembung Polresta Sidoarjo Aiptu Adin, Kamis (13/2), dengan memberikan edukasi bahaya *bullying* dan bijak bermedsos di MI As Syakira, Krembung.

Perundungan (*bullying*) menurut penjelasan dari Aiptu Adin kepada siswa-siswi MI As Syakira, bermula dari perbuatan saling mengejek sesama teman. Kemudian secara terus menerus tidak hanya berlanjut di lingkungan sekolah, namun sampai di ranah media sosial.



Polisi edukasi bahaya *bullying*.

Ketika saling mengejek dilanjutkan di media sosial,

tentu semakin menyebar luas hingga membuat korban *bully-*

ing merasa malu. Bahayanya lagi menurutnya, dampak *bullying* ini kadangkala berujung pada perkelahian antar teman.

"Tindakan perundungan atau *bullying* ini bila tidak segera terselesaikan tentu memiliki konsekuensi hukum bagi yang melanggar. Apalagi kalau sampai dibawa ke ranah media sosial dan berujung pada perkelahian atau tawuran. Karenanya kepada para pelajar mari stop *bullying*," pesan Aiptu Adin.

Lebih lanjut, para pelajar di-himbau Polisi apabila mengalami *bullying* atau mengetahui tindakan *bullying* agar jangan takut untuk segera melaporkan ke guru sekolahnya. Sehingga tidak semakin panjang *bullying* terjadi bila dapat segera diselesaikan oleh guru maupun dari pihak kepolisian. (kri/jok/epe)

CS Dipindai dengan CamScanner

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Dua Tim Satgas Dikerahkan untuk Perbaiki Jalan Lingkar Timur

Jalan Lingkar Timur mengalami kerusakan parah dengan banyak lubang di berbagai titik. Kondisi ini semakin memburuk akibat hujan deras dan tingginya mobilitas kendaraan berat yang melintas setiap hari.

M Saiful Rohman,
Wartawan Radar Sidoarjo

MENANGGAPI hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo menerjunkan dua tim Satgas untuk memperbaiki jalan yang rusak. Saat ini, proses perbaikan sedang berlangsung.

Kepala DPUBMSDA Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menjelaskan bahwa hujan deras memperparah kondisi jalan. Selain itu, tingginya volume kendaraan berat juga menjadi faktor utama kerusakan.

"Hal ini menyebabkan jalan semakin rusak. Oleh karena itu, kami menerjunkan Satgas penanganan jalan untuk segera melakukan perbaikan," ujarnya.

Agar perbaikan berjalan lebih cepat, pihaknya telah mengidentifikasi titik-titik kerusakan terlebih dahulu.

● Ke Halaman 10



BANYAK LUBANG: Penambalan Jalan Lingkar Timur yang rusak terus dilakukan.

CS Dipindai dengan CamScanner



Dua Tim Satgas...

Dua tim Satgas kini bekerja secara simultan dari dua arah, yaitu sisi utara di Kecamatan Buduran dan sisi selatan di Kecamatan Candi.

"Perbaikan sudah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu," tambahnya.

Meskipun perbaikan sedang berlangsung, pihaknya tetap mewaspadaai cuaca ekstrem. Hujan deras yang

terjadi dapat memperlambat proses pengerjaan jalan.

Tim Satgas yang dikerahkan akan terus bersiaga di sepanjang Jalan Lingkar Timur. Jika ditemukan kerusakan baru, mereka siap melakukan perbaikan segera.

"Untuk sementara, penanganan dilakukan oleh Satgas terlebih dahulu," tegasnya.

Saat ini, fokus utama adalah menanga-

ni titik-titik yang mengalami kerusakan parah agar kecelakaan dan hambatan bagi pengendara dapat diminimalisir.

Selain itu, pengguna jalan diimbau untuk tetap berhati-hati saat melintas di area perbaikan. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya diperbaiki bisa saja masih licin dan berbahaya.

"Prinsipnya, kami akan terus melakukan perbaikan agar kondisi jalan kembali optimal," pungkasnya. (sai/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



(DOK/DUTA.CO)

Achmad Wicaksono, S.Ak., M.Ak., dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA).

Efisiensi Anggaran Lebih Pro Rakyat

SIDOARJO - Kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat mendapat dukungan dari kalangan akademisi.

Achmad Wicaksono, S.Ak., M.Ak., dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), menyambut baik langkah pemerintah dalam mengoptimalkan APBN dan APBD melalui efisiensi.

“Dalam ilmu ekonomi, ada dua cara untuk memaksimalkan ekonomi: meningkatkan

pendapatan atau mengefisienkan biaya. Pemerintah memilih cara kedua untuk menghindari beban masyarakat seperti kenaikan pajak,” jelas Wicaksono.

Wicaksono menekankan pentingnya pengalihan dana hasil efisiensi ke program-program pro-masyarakat, salah satunya program makan bergizi gratis (MBG). Program MBG sendiri bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak dan mencegah stunting.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih berada di angka 21,6% pada tahun 2022. Program MBG diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan angka tersebut.

“Saya setuju dengan kebijakan efisiensi anggaran jika dananya dialihkan ke program unggulan seperti MBG. Manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Wicaksono mencontohkan pengalamannya bekerja sama dengan instansi pemerintah di Sidoarjo. Dia menemukan banyak ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. “Kebijakan ini mendorong instansi pemerintah untuk lebih berhemat dan mengelola anggaran secara tepat guna,” ujarnya.

Terdapat lima poin efisiensi anggaran pemerintah yang diwajibkan Prabowo Subianto, yakni belanja alat tulis kantor, seremonial, rapat/seminar, publikasi, dan perjalanan dinas. Wicaksono mengapresiasi langkah tersebut namun mengingatkan perlunya kontrol ketat di lapangan. • Imm

Sidoarjo Bersalawat

CS

Dipindai dengan CamScanner

DUTA

Sidoarjo Bersalawat





LOLET/DAJA

Peringati Harjasda ke-166, Pemkab gelar Sidoarjo Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf Selasa (11/2/25) malam.

Meriahkan Hari Jadi ke -166

SIDOARJO - Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-166, Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar acara Sidoarjo Bersholawat bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf. Acara ini digelar di area parkir Mal Pelayanan Publik (MPP) Lingkar Timur, Sidoarjo, pada Selasa (11/2/25) malam.

Sidoarjo Bersholawat merupakan salah satu rangkaian kegiatan perayaan Harjasda ke-166 yang mengusung tema "Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat." Acara ini dihadiri oleh Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi beserta istri, Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Dandim 0816, Kapolres Sidoarjo, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo.

Ribuan jamaah dari Sidoarjo dan sekitarnya turut hadir dalam acara yang diiringi lantunan sholawat serta alunan musik gambus. Mereka berkumpul di area parkir MPP Lingkar Timur untuk bersholawat dan berdoa bersama demi kemajuan dan keberkahan Kabupaten Sidoarjo yang kini memasuki usia ke-166.

Acara diawali dengan pembacaan sholawat serta doa bersama untuk para sesepuh yang telah beriring dalam membangun Kabupaten

telan berjasa dalam membangun
Sidoarjo. Dalam sambutannya, Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersyukur atas pencapaian daerah serta perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo yang terus berkembang.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir malam ini untuk mendoakan Sidoarjo agar menjadi daerah yang lebih baik, maju, dan sejahtera,” ujar H. Subandi.

Ia juga menegaskan pentingnya meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari marabahaya dalam kehidupan.

“Marilah kita bersama-sama meningkatkan iman agar terhindar dari musibah dan bencana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” tuturnya.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan antusiasme masyarakat yang larut dalam lantunan sholawat. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah Islamiyah serta menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Sidoarjo.

Perayaan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-166 masih akan berlanjut dengan berbagai kegiatan lainnya sebagai bentuk apresiasi dan refleksi atas perjalanan panjang Kabupaten Sidoarjo dalam membangun daerah dan masyarakatnya. ● **Loe**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



Sosialisasi dan Perencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Delta Wibawa.

LOETFI/DUTA

Sosialisasi GNSTA untuk Wujudkan Tertib Arsip

SIDOARJO - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Sosialisasi dan Perencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Delta Wibawa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, dr. Atok Irawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang tertata dengan baik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bermutu.

“Manajemen arsip yang rapi, tertib, dan sistematis akan memperlancar administrasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta bermuara pada pelayanan publik yang lebih optimal,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah, kecamatan, BUMD, desa/kelurahan, serta lembaga pendidikan dalam menerapkan sistem pengarsipan yang baik.

“Arsip adalah urusan wajib pemerintah. Sebagai dokumen negara,

arsip harus dikelola dengan baik karena menjadi bukti pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, dalam acara ini dilakukan penandatanganan pernyataan dukungan terhadap GNSTA oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, dan lembaga sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang GNSTA. Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang penerapan GNSTA di lingkungan pemerintahan daerah.

“Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip adalah program strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Arsip yang tertata dengan baik akan menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor

pembangunan,” ungkapnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, serta perwakilan lembaga pendidikan. Acara ini juga menghadirkan narasumber Diyah Kuswardani, MM., dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

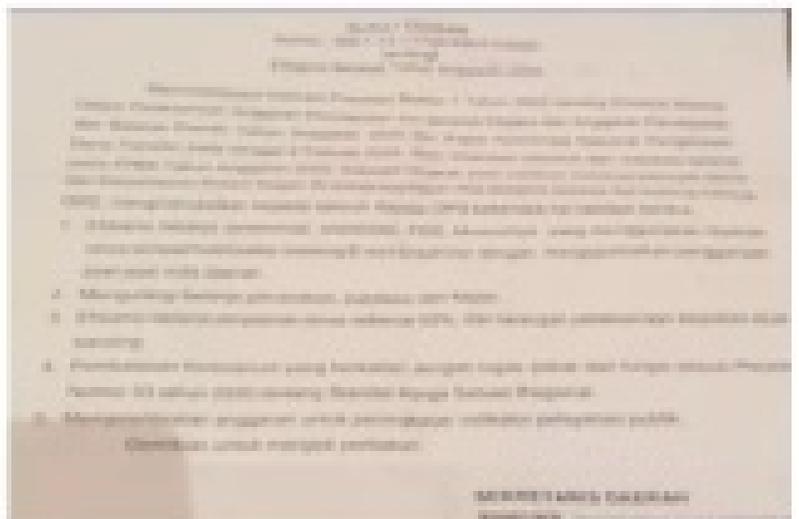
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam bidang kearsipan, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih nilai Kategori AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024. Kabupaten Sidoarjo juga menempati peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan masuk dalam 10 besar terbaik di tingkat provinsi, serta peringkat ke-19 dari 376 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan semangat yang sama, mari kita terus berkomitmen dalam menerapkan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kemajuan daerah kita,” pungkas dr. Atok Irawan. • Loe

SIKAPI INPRES 1/2025: Panggar DPRD dan TAPD Rapat Kaji Anggaran, SE Sekda Sepatutnya Direvisi

"Dalam rapat Banggar bersama TAPD ini, tentunya kami juga akan meminta penjelasan terkait keluarnya SE Sekda yang tidak pas dalam menerjemahkan Inpres itu," kata Dr H. Emir Firdaus ST,MM, anggota Banggar DPRD Sidoarjo.

12 Feb 2025 - 11:33



Kerangka Acuan (KA) dan R. M. Rincian (RM) serta Inpres Nomor 1 Tahun 2025, berjudul SE Sekda Nomor 900.1.12.1/1710. (2025) yang diterbitkan berdasarkan surat edik dan diterbitkan dalam surat/jumlahkan Inpres tersebut.

NUSADAILY – SIDOARJO : Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Sidoarjo Nomor 900.1.12.1/1710. (2025), sebagai tindak-lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja pada APBD 2025, benar-benar membuat DPRD "meradang". Pasalnya SE Sekda ini telah "premat", juga telah berdasarkan azas-asas yang bertentangan dalam menerjemahkan Inpres terkait kebijakan efisiensi anggaran pada APBD 2025.

Dalam menyikapi ini, DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Perihal Sidoarjo, pada Kamis (12/2/2025) siang tadi. "Dalam rapat Banggar bersama TAPD ini, tentunya kami juga akan meminta penjelasan terkait keluarnya SE Sekda yang tidak pas dalam menerjemahkan Inpres itu," kata Dr H. Emir Firdaus ST,MM, anggota Banggar DPRD Sidoarjo.

Selain sebelumnya, pada Rabu (12/2/2025) sore, pihak Banggar telah melakukan rapat internal dengan agenda pembahasan kajian dan inventarisasi pos-pos anggaran APBD 2025 yang potensi terkena imbas kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Yang cukup mengesankan pihak legislatif, dalam menyikapi kebijakan presiden ini, Sekda DK Ferry Apriandati, tiba-tiba mengeluarkan SE yang telah "premat", atau tanpa harus menunggu adanya petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang pemerintah pusat, apakah dari Kementerian maupun Kementerian sebagai landasan dasar dalam melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut.

Lebih diantisipasi lagi, SE Sekda yang ditandatangani 10 Februari 2025 ini dianggap bertentangan dalam menerjemahkan Inpres. Bahkan terkesan berdasarkan azas-asas sendiri, dan bertentangan. Salah satu contohnya ini SE Sekda bertentangan adalah pada point 3, di mana terdapat azas-asas bersifat pelaksanaan kegiatan studi banding. Padahal dalam Inpres mengatur efisiensi anggaran ini lebih bersifat

membatasi dan atau mengurangi. Sebaliknya tidak pernah ada masa yang berlebihan perikanan.

Sementara itu, ketua DPRD Sulfarjo H.Abdillah Nakh SM, merasa tugas komisi ini tentunya sudah untuk segala revisi SE itu sesuai dengan makna dari laporan. "Kalau dilihat SE yang beredar itu, agak berlebihan dalam memanfaatkan laporan nomor 1 Tahun 2025. Sehingga kita minta, agar revisinya SE itu direvisi, agar tidak menyebabkan gejolak," ujarnya.

Sementara jika laporan nomor 1/2025 itu tidak ditafsirkan berlebihan, maka tidak akan terjadi keputusan yang berlebihan seperti adanya SE itu. Apalagi sampai saat ini, petunjuk teknis soal laporan itu sudah juga telah turun. "Kalaupun, SE itu saya harap sesuai dengan juknis terkait laporan itu sendiri dan tidak boleh ditafsirkan kemana-mana," jelas Cak Nakh, kapten pimpinan legislatif yang juga menjabat Ketua DPR PKB Sulfarjo ini.

Lebih lanjut, dia mengatakan mengemukakan terkait apapun perubahan dalam keputusan yang sudah ditetapkan dalam APBD itu, harus dibatasi bersama antara eksekutif dan legislatif. "Tidak harus menunggu PAJ untuk membatasi keputusan APBD 2025 itu, karena memang sifatnya urgent dengan adanya laporan 1 2025. Namun tetap harus dibicarakan bersama dulu," ujarnya. (**Cak Sid)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Gelar Sosialisasi GNSTA untuk Wujudkan Tertib Arsip



Zainul Arifin - Daerah

Kamis, 13 Feb 2025 15:41 WIB



Asisten administrasi dan Umum Sekkab Sidoarjo,, dr Atok Irawan bersama para OPD saat sosialisasi tertib arsip. (list)

SIDOARJO | B-news.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Sosialisasi dan Perencanaan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa (13/2/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Kabupaten Sidoarjo Dinobatkan sebagai Pemda dengan Pengelolaan DBHCHT Terbaik 2024

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, dr. Atok Irawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengelolaan arsip yang tertata dengan baik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan bermutu.

"Manajemen arsip yang rapi, tertib, dan sistematis akan memperlancar administrasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, serta bermuara pada pelayanan publik yang lebih optimal," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah, kecamatan, BUMD, desa/kelurahan, serta lembaga pendidikan dalam menerapkan sistem pengarsipan yang baik. Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"Arsip adalah urusan wajib pemerintah. Sebagai dokumen negara, arsip harus dikelola dengan

baik karena menjadi bukti pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat," tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, dalam acara ini dilakukan penandatanganan pernyataan dukungan terhadap GNSTA oleh berbagai perwakilan dari perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, dan lembaga sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Baca Juga: [Peringati HGN ke-65, Pemkab Sidoarjo Gelar Workshop dan Beragam Lomba](#)



Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo, Ridho Prasetyo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang GNSTA.

Selain itu, kegiatan ini juga mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang penerapan GNSTA di lingkungan pemerintahan daerah.

"Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip adalah program strategis yang bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik. Arsip yang tertata dengan baik akan menjadi bukti akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan," ungkapnya.

Sosialisasi ini diikuti oleh 70 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintahan, kecamatan, desa/kelurahan, BUMD, serta perwakilan lembaga pendidikan. Acara ini juga menghadirkan narasumber Diah Kuswardani, MM., dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga: [356 Orang Ikuti Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi di Sidoarjo](#)

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam bidang kearsipan, Kabupaten Sidoarjo berhasil meraih nilai Kategori AA (Sangat Memuaskan) dalam penilaian pengawasan kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun 2024.

Kabupaten Sidoarjo juga menempati peringkat ke-7 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan masuk dalam 10 besar terbaik di tingkat provinsi, serta peringkat ke-19 dari 376 kabupaten/kota se-Indonesia.

"Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Dengan semangat yang sama, mari kita terus berkomitmen dalam menerapkan pengelolaan arsip yang lebih baik demi kemajuan daerah kita," pungkas dr. Atok Irawan. (*)

Editor : [Zainul Arifin](#)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Dewan Dorong Percepatan Perekaman KTP di SMA Negeri 1 Taman

by Radar Jatim — 13 Februari 2025 In Layanan Publik, Pemerintahan, Pendidikan, Politik



Ketua Dewan Sidoarjo, Kepala Dispendukcapil, didampingi Kepala SMA Negeri 1 Taman sedang memantau proses perekaman KTP Pemula

116
VIDEOS



SIDOARJO (RadarJatim.id) —

Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo Goes to School terus berjalan, kali ini giliran siswa SMA Negeri 1 Taman. Percepat Perekaman KTP Pemula dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Sidoarjo telah dilakukan pada (13/2/2025) di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo.

Bertujuan untuk mempercepat perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemula bagi siswa-siswi SMAN 1 Taman serta mengedukasi tentang pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

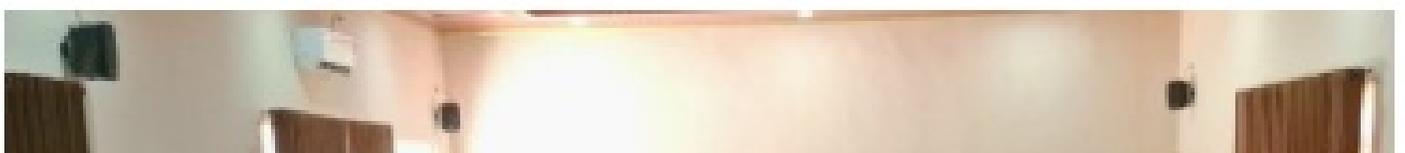
Hadir langsung Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, dan anggota Komisi A, Rizal Fuady, SE (Anggota Komisi dan Drs. Reddy Kusuma, MA Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo, disambut langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Taman, Dewi Nurmalasari, M.Pd bersama para guru, serta puluhan siswa yang antusias mengikuti acara.

Kegiatan ini menjadi momen penting bagi generasi muda, terutama siswa-siswi yang baru memenuhi syarat untuk memiliki KTP.

Kepala Dispendukcapil Reddy Kusuma menyampaikan kalau program ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan setiap warga negara, termasuk generasi muda, memiliki identitas kependudukan yang sah.

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

"KTP bukan sekadar kartu identitas, melainkan bukti kewarganegaraan yang memudahkan akses pelayanan publik di era digital," sampainya.





Ketua Dewan Abdillah Nasih juga menegaskan kalau program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital. "Dengan memiliki KTP dan identitas kependudukan digital, siswa-siswi akan lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, seperti pendaftaran kuliah, pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya," tegasnya.

Selain sosialisasi, kegiatan ini juga langsung memfasilitasi perekaman KTP pemula bagi siswa-siswi yang telah memenuhi syarat.

Proses perekaman dilakukan dengan cepat dan efisien, didukung oleh tim teknis dari Dispendukcapil yang telah menyiapkan peralatan canggih untuk memastikan data siswa terekam dengan baik.

Rizal Fuady, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo, turut memantau jalannya proses perekaman. "Kami ingin memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah," ujarnya.

Kegiatan ini mendapat tanggapan positif dari para siswa dan guru SMA Negeri 1 Taman. Andya, salah seorang siswa kelas XI, mengungkapkan kegembiraannya bisa mengurus KTP langsung di sekolah. "Ini sangat memudahkan kami. Biasanya harus antri lama di kantor Dispendukcapil, tapi sekarang bisa langsung di sekolah. Terima kasih kepada Dispendukcapil," ujarnya.

Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Nurmalasari sangat mengapresiasi atas inisiatif program pemerintah. "Ini sangat membantu siswa-siswi kami, terutama yang sibuk mempersiapkan ujian. Mereka tidak perlu lagi repot mengurus KTP ke kantor kecamatan atau kabupaten," tuturnya.

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital

Selain perekaman KTP, kegiatan ini juga mengedukasi siswa tentang pentingnya aktivasi identitas kependudukan digital.

Reddy Kusuma juga menjelaskan bahwa identitas digital ini akan memudahkan siswa dalam mengakses berbagai layanan berbasis online, seperti e-KTP, aplikasi pelayanan publik, dan lainnya. "Dengan identitas digital, siswa bisa lebih siap menghadapi era digitalisasi," tegasnya.

Kegiatan Goes to School Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo di SMA Negeri 1 Taman berjalan lancar dan sukses. Program ini tidak hanya memudahkan siswa dalam mengurus KTP pemula, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya identitas kependudukan digital.

Diharapkan, kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sidoarjo guna memastikan tidak ada lagi generasi muda yang tertinggal dalam hal administrasi kependudukan. (mad)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPRD Sidoarjo Pertanyakan Akurasi Data Penerima Bansos Insentif TPQ Rp 33 M

Editor: Fathur Roziq

13 Februari 2025 17:55



Suasana hearing antara Komisi D DPRD Sidoarjo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, dan Kantor Kemenag Sidoarjo di DPRD Sidoarjo pada Kamis (13 Februari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

AA

KETIK, SIDOARJO – Komisi D DPRD Sidoarjo mengingatkan lagi pentingnya kehati-hatian dalam penyaluran insentif guru Taman Pendidikan al Quran (TPQ). Nilainya sekitar Rp 33 miliar per tahun. Sebab, masih ditemukan data-data penerima insentif yang ternyata warga luar Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyatakan, saat evaluasi APBD 2025 lalu, Pemprov Jatim menemukan kejanggalan data penerima insentif guru-guru ngaji TPQ di Kabupaten Sidoarjo.

Data itu menyebutkan, masih ada guru TPQ penerima insentif yang merupakan warga kabupaten/kota lain. Padahal, insentif guru TPQ itu bersumber dari APBD Sidoarjo.

Di antaranya, warga Kedinding, Kenjeran; dan Simokerto, Surabaya. Ada pula warga Kebonwaris, Kecamatan Pandaan; dan Kepulungan, Kecamatan Gempol; serta Ketan Ireng, Kecamatan Prigen. Semuanya masuk wilayah Kabupaten Pasuruan.

Sekini itu, kejanggalan data juga terjadi. Misalnya, nama dobel yang disebut dengan alamat tempat tinggal yang rancu. Sebut saja nama Shofi Roychanah. Nama itu tersebut didata dua kali. Alamatnya pun disebutkan sebagai Banjarpanji, Tanggulangin, Pasuruan.

"Ini jangan sampai terulang lagi. Persyaratan data berbasis EMIS (Sistem Pendataan Pendidikan di lingkungan Kementerian Agama)," kata Bangun Winarso.



Komisaris D DPRD Sidoarjo Pramono (kiri) dan Kepala Kemenag Sidoarjo Saif Imron (kanan) saat menghadiri hearing di DPRD Sidoarjo Kamis (10 Februari 2025). (Foto: Fatmahanik/beritasidaro)

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Pramono Yudiarso menegaskan bahwa penerima uang insentif guru itu harus dipastikan lagi. Yang berhak menerima adalah warga Kabupaten Sidoarjo karena sumber dana adalah bantuan sosial dalam APBD Sidoarjo.

"Mohon dikembalikan APBD itu ke warga Sidoarjo," tegas legislator DPRD Sidoarjo asal Partai Gerindra tersebut.

Dangun Winanso menyebutkan, pada 2024, total guru TPQ penerima insentif mencapai 6.350-an orang. Data yang masuk di EMIS baru sekitar 4.000-an. Penerimaan EMIS ini harus dipatuhi. Sebab, nilai insentif mencapai lebih dari Rp 33 miliar. Tercatat pada 2024 lalu, total dana insentif itu mencapai Rp 34,65 miliar.

Baca Juga

[Polda Jatim Periksa 14 Sakal Kasus HGB di Laut Sidoarjo](#)

"Tolak ukur hasilnya pun harus jelas," tandas legislator DPRD Sidoarjo dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Pertanyaan soal akses data penerima insentif ini muncul pada akhir Desember 2024 lalu. Saat itu, DPRD Sidoarjo menerima evaluasi APBD 2025 dari Gubernur Jatim. Lainnya, antara lain, mempertanyakan soal data-data penerima insentif guru TPQ.

Evaluasi Gubernur Jatim itu dilanjutkan. Komisi D DPRD Sidoarjo pun memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo dan Kantor Kemenag Sidoarjo. Baru pada Kamis (12 Februari 2025), Kemenag bisa menghadiri hearing dengan DPRD Sidoarjo.



Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo Muli Imron Rosyadi (tengah) menyampaikan paparan kepada komisi II DPRD Sidoarjo. (Foto: Fathur Rosli/ketik.com)

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sidoarjo Muli Imron Rosyadi menyebutkan, yang benar-benar menguasai data tentang TPQ adalah Bidang TPQ Kemenag Sidoarjo. Data tentang guru-guru TPQ memang belum fiks. Karena itu, Kemenag melabukan rekap lagi dengan membuat Google Form.

Muli Imron Rosyadi menambahkan, Kemenag akan duduk bersama dengan Dinas Pendidikan dan Bagian Kerja Pamkabs Sidoarjo. Dia menekankan bahwa data yang paling fiks adalah yang masuk EMIS.

Kemenag telah mencoba mengumpulkan data-data ril lewat Google Form. Ditekankan bahwa data yang fiks adalah data yang masuk di Google Form. Sehingga pertanggungjawabannya lebih jelas. Dari sejumlah 10 ribuan guru TPQ, yang sudah mengisi Google Form sekitar 5 ribuan.

Kemenag menekankan bahwa masing-masing yang menerima insentif itu adalah benar-benar orang yang di TPQ. Juga ditebalkan lagi bahwa yang menerima benar-benar orang asli Sidoarjo.

"Nanti kita pastikan lagi. Dari 5 ribu sekian tadi, berapa yang ber-KTP Sidoarjo," ungkap Muli Imron kepada wartawan setelah hearing dengan DPRD Sidoarjo.

Baca Juga

[Anggaran Perjalanan Dinas Pamkabs-DPRD Rp 132 M, Penghematan Capai Rp 66 M](#)

Jadi, nanti pastinya, selama mereka tidak mengisi EMIS, Kemenag juga tidak berani mengaulkan. Data-data di EMIS akan dicocokkan dengan Dinas Pendidikan Sidoarjo. Mereka yang masuk EMIS secara khusus akan dibina. Di TPQ itu seperti apa.

Sedang anggaran, Muli Imron mengaku belum tahu. Begitu pula soal kapan insentif tersebut cair, Muli Imron juga belum tahu. Sebab, anggaran insentif guru-guru TPQ itu tidak berasal dari Kemenag. (*)

Warga Sidoarjo Keluhkan Bau Sampah, Pemkab Diminta Tindak Tegas

13 February 2025



Badan jalan menjadi tempat pembuangan sampah (TPS). Kondisi kumuh di Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, wilayah Sidoarjo barat ini diharapkan segera ada tindakan dari pemerintah

Share Berita:



SIDOARJO, PEWARTAPO5.COM – Aksi Jihad rawat kali yang digencarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo tak berbanding lurus dengan fakta di lapangan. Nyatanya baru-baru ini, tumpukan sampah di tepi ruas jalan Surabaya-Mojokerto masih menjadi pemandangan tak sedap. Hal ini menjadi tantangan bagaimana menggugah kesadaran bersama menciptakan zero sampah.

Dari pantauan pewarta terlihat sampah menumpuk di wilayah Sidoarjo barat (Sibar). Tepatnya di Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo. Dari keterangan warga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo diharapkan mengambil tindakan tegas menyelesaikan pekiknya soal sampah.

Ceceran sampah sepanjang 15 meter yang didominasi non-organik pada akhirnya terus menggunung. Selain karena tak ada penanganan serius, tiap harinya masyarakat juga kian membandel membuang sampah sembarangan.

"Jelas sangat mengganggu pengguna jalan," ungkap Husain, salah seorang warga.

Apalagi, kata Husain, musim hujan menimbulkan aroma busuk yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit. Mengingat lokasi tak jauh dari pemukiman warga

"Selama ini tidak pernah ada pembersihan dari pemerintah baik dari pihak desa atau Kecamatan. Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo termasuk sekadar memberikan fasilitas ke warga berupa kontainer sampah di spot-spot tertentu agar warga tidak buang sampah sembarangan," ungkapnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Bambang mengatakan

sampai saat ini belum ada upaya penanganan untuk mengangkut sampah di seberang jalan.

"Saya katakan itu sampahnya dari seberang sana, itu sama halnya menumpuk bau menyengat," keluh Ketua RT 05/03

Bambang beranggapan kalau lapor sendiri tanpa ada dukungan dari perangkat desa akan nihil hasil. Bambang hanya bisa berharap sampah yang menumpuk segera di angkut.

Bambang menceritakan bahwa dirinya sering menegur jika mengetahui pengguna jalan bawa sampah di buang ke seberang jalan.

"Dari seberang jalan, saya tegur, jangan buang sampah di situ. Tapi tetap saja bandel," tutur Bambang. (zki)



Sekda Sidoarjo Revisi SE Larangan Studi Banding, Refocusing Anggaran Dialihkan ke Peningkatan Pelayanan Publik



RepublikOnline.Com

Jakarta, 16 Feb 2020 08:37 WIB



345x345

Brand & Performance
ADVERTISEMENT

LEARN MORE



Sidoarjo (republikjatim.com) - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sidoarjo Dr Fenny Apridawati, akhirnya menandatangani Surat Edaran (SE) tertanggal 10 Februari 2025 yang sempat melahirkan begaduan di kalangan anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo. Hal ini dikarenakan SE itu, kebebasan dalam menjeramahkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah.

Perubahan itu terjadi saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo, Kamis (13/02/2025). Selain itu, dalam rapat ini juga sepakat untuk melakukan efisiensi anggaran belanja pemerintah dan atau refoocusing anggaran APBD 2025 menyusul berbitnya Inpres Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 itu.



Kamis, 13 Feb 2025 14:38 WIB

Tersangka Utama Kekasih Korban, 3 Pemuda Pembunuh Siswa SMA di Jombang Yang Jenazahnya Ditemukan di Sungai Ditahan

Dalam rapat Banggar bersama TAPD yang dipimpin Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nash yang juga merangkap sebagai Ketua Banggar DPRD Sidoarjo ini berlangsung selama tiga jam di dalam ruang rapat paripurna DPRD Sidoarjo. Bahkan dalam rapat itu sempat memanas. Beberapa anggota legislatif (DPRD Sidoarjo) yang hadir dalam rapat sempat menacerca pertanyaan kepada Sekda Fenny, seputar SE No. 900.1/2.1/1740/438.6.2./2025.

"Karena isi dari SE Sekda ini lebih bersifat sebuah asumsi yang kebebasan dalam menjeramahkan Inpres Presiden. Salah satunya, pada point 3 terdapat narasi berbunyi pelarangan kegiatan studi banding," ujar salah seorang anggota Banggar DPRD Sidoarjo dalam rapat itu.

Padahal, dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, jelas-jelas tidak ada memuat narasi berbunyi pelarangan. Kenyataannya, dalam Inpres Nomor 1 yang mengatur kebijakan efisiensi ini sifatnya sebatas membatasi atau mengurangi beberapa pos anggaran belanja pemerintah.

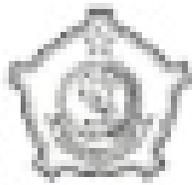
Menyadari kekeliruan penerbitan SE itu, Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati sempat meminta maaf. Dia juga mengemukakan SE yang diterbitkan tertanggal 10 Februari 2025 telah direvisi dengan diterbitkan SE Nomor 900.1/2.1/1076/438.6.2./2025 tertanggal 12 Februari 2025. Dalam SE baru ini sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 yang mengatur efisiensi belanja itu tidak ada lagi narasi berbunyi pelarangan.

"Tapi, lebih bersifat membatasi, efisiensi dan atau mengurangi beberapa pos anggaran belanja," katanya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon : (031) 8021940, 8021940, 8021940 Faks : (031) 8041148
Email : info@sidoregional.go.id Website : www.sidoaregional.go.id

Sidoarjo, 12 Februari 2025

Yth. Sid. Para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo

di

S I D O A R J O

SURAT EDARAN

Nomor : 600.1.12.1/1480408.6.2025

tentang

Perubahan atas Surat Edaran Sekretaris Daerah

Nomor : 600.1.12.1/1480408.6.2025 tentang

Effisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025

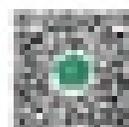
Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Dana Transfer pada tanggal 5 Februari 2025, memandang perlu melakukan perubahan terhadap Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 600.1.12.1/1480408.6.2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025.

Perubahan dimaksud adalah mengubah ketentuan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menetapkan belanja seremonial, sosialisasi dan PCD.
2. Mengurangi belanja perantara, publikasi dan kajan.
3. Efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
4. Pembatasan Honorarium Tim ASN yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
5. Memprioritaskan anggaran untuk peningkatan indikator pelayanan publik.

Demikian untuk menjadi perhatian.

SEKRETARIS DAERAH



Mempergunakan nomor dan kode surat

Dr. PENNY APRIDAWATI, S.KM., M.Kes.
NIP. 198404131991320210

Dr. PENNY APRIDAWATI, S.KM., M.Kes.
Perintis Utama Medya
NIP. 198404131991320210

Tembusan:
Yth. Bupati Wakil Bupati
(sebagai laporan)



REPUBLIKATIM
Cepat, Akurat, Tajam, Faktual dan Terpercaya

Sementara Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nashih menegaskan hasil rapat menghasilkan kesepakatan dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah. Termasuk, juga dengan SE Sekda Sidoarjo yang sempat menimbulkan kegaduhan itu sudah direvisi dengan terbitkan SE baru yang sesuai dengan kebijakan Inpres Nomor 1 itu.

"Semua sudah kelir. Sekda Sidoarjo sudah merevisi SE-nya dan SE baru sudah sesuai dengan kebijakan Inpres Presiden RI. Begitu pula dalam pelaksanaan efisiensi anggaran belanja disepakati untuk dibahas bersama antara Banggar dan TAPD," ungkap Cak Nashih sapaan pimpinan politisi yang juga Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.

Politisi senior PKB asal Waru ini mengemukakan inlinya pihaknya tidak mempercakikan soal SE Sekda. Namun mendukung sepenuhnya kebijakan efisiensi anggaran seperti yang diatur dalam Inpres Nomor 1 itu. Hanya saja, untuk melaksanakan kebijakan itu, harus terlebih dahulu melalui pembahasan bersama antara Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Sidoarjo.



Revisi, 01 Feb 2024 10:02 WIB

Sidoarjo Dinobatkan Sebagai Pemda dengan Pengelolaan DQHCHT Terbaik 2024

"Jadi nanti ada rapat lanjutan antara legislatif dan eksekutif yang khusus melakukan kajian dan inventarisasi berbagai permasalahan anggaran. Terutama, terkait pos-pos anggaran belanja mana saja yang perlu dilakukan refocusing sebagai bentuk kebijakan efisiensi dan pembatasan anggaran belanja," jelasnya.

Selain itu, Cak Nashih mengemukakan dari hasil refocusing anggaran ini pihaknya mengemukakan dialihkan pada pos belanja yang arahnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan infrastruktur.

"Tentunya, dari hasil refocusing anggaran ini akan lebih bermanfaat kalau digunakan kepentingan publik. Selain sektor pelayanan masyarakat, juga bisa untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Ini lebih bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. Any/Waw

Editor : Redakal



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab-DPRD Rp 132 M, Penghematan Capai Rp 66 M

Editor: Fathur Roziq

13 Februari 2025 21:58



Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo Dr Fenny Apridawati berbincang dengan anggota Banggar DPRD Sidoarjo pada Kamis (13 Februari 2025). (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Politik & Pemerintahan



Aa

#A

KETIK, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo maupun Pemkab Sidoarjo menegaskan sikap dan komitmen untuk mematuhi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sidoarjo mulai membahas detail efisiensi. Juknis belum turun.

Kamis (13 Februari 2025), Banggar DPRD Sidoarjo dan TAPD Pemkab Sidoarjo bertemu di ruang paripurna DPRD Sidoarjo. Legislatif maupun eksekutif sepakat membahas bersama efisiensi. Tahap awal masih menyamakan persepsi.

"Karena penyusunan APBD ini merupakan kerja bersama. Jika ada perubahan juga harus dibahas bersama," kata Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.

Prinsipnya, lanjut dia, DPRD Sidoarjo dan Pemkab Sidoarjo sepakat melaksanakan inpres tersebut. Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



Apa saja yang dibahas dalam rapat anggaran dan tim anggaran? Abdillah Nasih menyebutkan, antara lain, identifikasi tentang berapa kebutuhan efisiensi. Pos mana saja yang disesuaikan dengan inpres. Setelah itu, alokasinya untuk apa saja.

"Yang jelas pelayanan publik. Sasaran misalnya untuk rehab sekolah, jalan rusak, dan lainnya. Tapi, apa mutlak itu? Kita lihat nanti karena belum dibahas," tambah legislator DPRD Sidoarjo dari PKB tersebut.

Abdillah Nasih menegaskan, efisiensi bukanlah pengurangan anggaran dalam APBD. Efisiensi adalah pengalihan anggaran ke program prioritas sesuai poin yang ada dalam Inpres. Masing-masing swadaya pangan, pendidikan, dan kesehatan.

"Anggaran perjalanan dinas mencapai sekitar Rp 132 miliar. Pengembalian DAU Rp 9 miliar," tambah Abdillah Nasih.

Informasi yang diperoleh *Ketik.co.id* dari berbagai sumber menyebutkan, Sekretariat DPRD Sidoarjo memprogramkan perjalanan dinas Rp 43 miliar.

Baca Juga:

[Polda Jatim Periksa 14 Saksi Kasus HGB di Laut Sidoarjo](#)

Jika total anggaran perjalanan dinas dalam APBD 2025 mencapai Rp 132 miliar, maka anggaran perjalanan dinas di Pemkab Sidoarjo sekitar Rp 89 miliar. Belum didapat informasi detail anggaran perjalanan dinas di Pemkab Sidoarjo.

Namun, penghematan anggaran perjalanan dinas direncanakan mencapai 50 persen. Jika total perjalanan dinas mencapai Rp 132 miliar, maka penghematan anggaran mencapai sekitar Rp 66 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, prinsip efisiensi terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 adalah kepatuhan dan kehati-hatian. Sekretariat Daerah telah mengeluarkan Surat Edaran No. 900.112.1/1740/438.8.2/2025 tentang Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2025.

SE tersebut kemudian direvisi. Pertama, penghematan belanja seremonial, sosialisasi, dan forum diskusi kelompok (FGD). Khususnya yang menggunakan layanan sewa tempat, hotel, paket rapat, serta jasa event organizer dengan memanfaatkan aset daerah. Dalam SE yang baru, hanya disebut penghematan belanja seremonial, sosialisasi, dan forum diskusi kelompok (FGD).

Poin kedua, penghapusan larangan pelaksanaan studi banding. Sebelumnya, ada larangan pelaksanaan studi banding.

"Efisien yang kita maksudkan ialah patuh dan taat. Prinsip kehati-hatian," ungkap Sekda Fenny Apridawati.

Untuk anggaran perjalanan dinas, efisiensi wajib 50 persen. Itu merupakan aturan tertulis dalam Inpres No. 1 Tahun 2025. Tidak bisa diganggu gugat.

Kalau ada penafsiran yang berbeda-beda, lanjut dia, itu terjadi karena ada mispersepsi. Pandangan dari sisi hukum. Tapi, setelah ada revisi SE Sekda, semua sudah sepakat.

Baca Juga:

[Bupati Bangkalan dan UTM Akan Kolaborasi Tentukan Kebijakan Efisiensi Anggaran](#)

Pengalihan anggaran hasil efisiensi ditujukan pada perbaikan sekolah, banjir, dan layanan publik lainnya. Untuk yang lain-lain, TAPD Pemkab Sidoarjo menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat.



MACET: Anggota Polsek Gedangan membantu membersihkan pohon tumbang.

Pohon Tumbang di Gedangan Sempit Tutup Jalan

GEDANGAN-Sebuah pohon tumbang di Jalan Letjen S. Parman, Gedangan, pada Kamis (13/2) pagi. Akibatnya satu ruas jalan arah Surabaya-Sidoarjo tertutup. Polsek Gedangan bersama BPBD Sidoarjo segera turun ke lokasi untuk menge-

vakuasi pohon yang menghalangi jalan tersebut.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi proses evakuasi sempit menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Kendaraan yang hendak menuju Gedangan, Sidoarjo, harus

mengantre untuk melintas.

“Sempit terjadi kepadatan karena pohon tumbang bertepatan dengan jam berangkat kerja. Kami melakukan pengaturan lalu lintas serta membantu proses evakuasi di lokasi,”

● Ke Halaman 10

Pohon Tumbang...

ujar Kapolsek Gedangan, Kopol Ari Priambodo.

Ia menjelaskan bahwa pohon tersebut mulai terlihat condong ke jalan sekitar pukul 05.00. Petugas BPBD Sidoarjo segera tiba di lokasi untuk melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang. Proses evakuasi selesai sekitar pukul 07.00.

Meskipun satu ruas jalan tertutup, kepolisian tidak menutup seluruh jalur. Pengendara tetap bisa melintas di lajur kanan. Namun, antrean kendaraan sempit terjadi selama proses evakuasi berlangsung.

“Kami melakukan pengaturan lalu lintas agar kendaraan tetap bisa melintas. Setelah evakuasi selesai, arus lalu lintas kembali normal,” tambahnya. (gun/vga)